

Mencuri Jangan Di Batubara

Oleh DR Erwan Effendi, MA

Hampir dua periode OK Arya sebagai Bupati Batubara, tapi kantor bupati hingga kini belum juga terbangun seperti beberapa daerah pemekaran lainnya di Sumatera Utara.

Bagai disambar petir di siang bolong, ketika mendengar Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, SH, MM terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Rabu (13/9). Banyak kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan para aktivis di Batubara tidak percaya kalau hal itu terjadi pada OK Arya, meski sepanjang tahun diduga terjadi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat banyak membuat pengaduan baik ke KPK, Polisi dan Jaksa. Begitu juga ketika terjadi kasus hilangnya uang kas Pemda Batubara Rp.80 miliar, namun yang terjerat kasus korupsi adalah para kepala dinas dan staf. Sudah banyak kepala dinas dan staf yang masuk penjara bahkan hingga kini ada yang dalam proses di kejaksaan. Sementara OK Arya sebagai orang pertama dan penguasa tunggal di Pemkab Batubara tidak pernah tersentuh hukum. Kondisi itu menimbulkan berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat bahkan menyatakan bahwa OK Arya sulit disentuh hukum jika masih berkuasa alias kebal hukum.

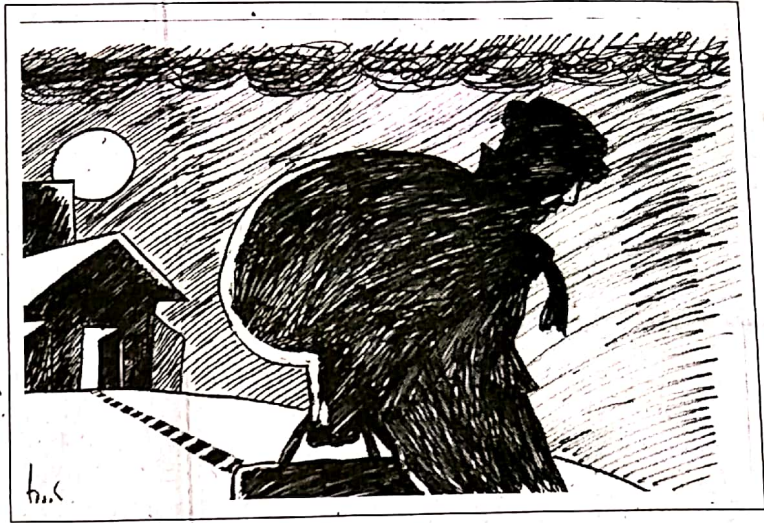
Kini, apa yang selama ini menjadi opini masyarakat sudah terjawab. OK Arya gelar Datok Setia Amanah sudah dijadikan tersangka oleh KPK sebagai penerima suap terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017. Total suap yang diterima OK Arya disebutkan KPK mencapai Rp4,4 miliar. Tersangka lain yakni sebagai penerima, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herman Herdady dan pemilik dealer mobil Sujendi Tersoni Tarsono. Tersangka sebagai pemberi yakni kontraktor Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar. Kita yakin bahwa jumlah tersangka akan terus bertambah jika KPK terus melakukan investigasi. Pengusutan bukan hanya pada tahun anggaran 2017, tetapi KPK harus melakukannya sejak tahun pertama anggaran pada periode pertama OK Arya menjadi Bupati Batubara. Termasuk raibnya uang Rp.80 miliar. Kita juga yakin bahwa korupsi di Pemkab Batubara bukan hanya terjadi pada tataran eksekutif tapi juga tidak tertutup kemungkinan di jajaran lembaga legislatif yang turut memproses hingga mengesahkan APBD. Oleh karena itu pula, kita berharap OK Arya jangan memikul sendiri beban itu, tetapi harus berani mengungkap bahwa terjadinya praktik korupsi dilakukan secara berjamah di Pemkab Batubara.

Memang secara empiris, terkecuali bagi para "panglima talam" sudah hampir 10 tahun pemekaran atau delapan tahun bupati definitif, berbagai sektor pembangunan di Batubara tidak terlihat signifikan. Belum ada sektor pembangunan yang secara sungguh-sungguh mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan ironisnya,

potensi yang ada tidak dapat digerakan seperti pelabuhan Tanjungtiram. Padahal, sebelumnya pelabuhan tersebut sempat beroperasi untuk angkutan penumpang Tanjungtiram -Port Klang, Malaysia dan dikelola pihak swasta. Sulit diterima akal sehat kalau Pemda Batubara yang memiliki modal dan kekuasaan serta sumber daya manusia (SDA) yang berkualitas tidak mampu mengelola pelabuhan, karena pihak swasta saja mampu. Jika pelabuhan itu beroperasi, perekonomian masyarakat akan bergerak, karena di kawasan itu akan terjadi peredaran uang dari proses berangkat dan kembalinya penumpang. Masyarakat pedagang kecil, menengah dan atas tumbuh dengan baik. Tenaga tukang pikul dan angkutan akan semakin bertambah, begitu juga lapangan kerja semakin terbuka. Tetapi mengapa hal itu tidak dilakukan oleh OK Arya?

Begitu juga di sektor perikanan dan pertanian. Ironisnya, yang terjadi malahan bentrokan antara nelayan skala kecil dengan nelayan pukat harimau sepanjang tahun, tidak pernah terselesaikan oleh bupati. Padahal, sektor perikanan dan pertanian adalah merupakan tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Batubara karena merupakan gantungan dan tumpuan hidup, harusnya pemkab melakukan berbagai terobosan untuk bagaimana mengembangkan dua sektor tersebut, sehingga mampu mendorong ekonomi masyarakat. Sedapnya, pada awal memangku jabatan bupati, OK Arya menyatakan akan menjadikan laut sebagai kolam untuk meningkatkan pendapatan nelayan, luar biasa.

Hampir dua periode OK Arya sebagai Bupati Batubara, tapi kantor bupati hingga kini belum juga terbangun seperti beberapa daerah pemekaran lainnya di Sumatera Utara. Padahal, kantor itu adalah merupakan istana tempat mengelola roda pemerintahan. Kemudian, masyarakat juga berharap Pemkab Batubara mau membangun perguruan tinggi seperti daerah kabupaten lainnya. Bagaimana pun sektor pendidikan harus menjadi skala prioritas dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDA) masyarakat Batubara. Kalau selama ini, jika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, calon mahasiswa harus ke luar kota, dengan berdirinya perguruan tinggi di Batubara, hal itu tidak perlu lagi. Biaya kuliah juga dapat terjangkau sehingga SDM Batubara secara perlahan tapi pasti akan berkualitas. Sebagai daerah religius dan mengingat bahwa di Batubara banyak lahir para wali, maka masyarakat minta pemda membangun masjid yang menjadi kebanggaan umat Islam di daerah itu bahkan menjadi ikon Batubara. Sakitnya, bupati malah menata pulau Salanama menggunakan uang APBD puluhan miliar rupiah dengan alasan menjadi obyek wisata. Padahal, penataan itu hanya untuk tempat "menyenang-nyenangkan" diri dan para



stafnya dengan membeli *jetski* seharga miliaran rupiah. Sedangkan sebagai tujuan wisata hanya sedikit.

Soal pembangunan infrastruktur terutama jalan, ini selalu menjadi keluh kesah masyarakat. Sepanjang tahun hampir tidak ada jalan yang bagus di Batubara. Sedihnya, perbaikan dan pembangunan jalan seperti jalan beton di Desa Bagan Dalam, beberapa minggu setelah dikerjakan sudah rusak, besi bermunculan hingga mengancam keselamatan pengguna jalan. Hal yang sama juga terjadi pembuatan pada pembuatan jalan beton tahap pertama Kedai Sianam menuju Simpang Dolok. Begitu juga jalan di kawasan Gambus Laut, Sei Balai ke Ujung Kubu, Simpang Gambus menuju ke Tanjungtiram, Simpang Lima Puluh ke Simpangtiga. Sebelumnya, kita tidak dapat memastikan apakah buruknya infrastruktur di Batubara merupakan dampak dari terjadi korupsi terhadap penggunaan APBD. Namun, setelah adanya pengumuman oleh KPK bahwa Bupati Batubara OK Arya tersangka menerima suap Rp.4,4 miliar terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017, menambah keyakinan kita bahwa rusaknya infrastruktur di Batubara, karena banyaknya uang suap.

Apalagi jika bicara soal penataan kota, terutama kota pantai Tanjung Tiram dan Medan Deras. Dua kota pantai ini seperti *kerakap tumbuh di batu segan hidup mati tak mau*. Tidak ada penanganan serius untuk bagaimana melakukan penataan sebaik mungkin, sehingga bisa menjadi apik. Pemukiman penduduk di dua kota pantai ini lebih sering tergenang air laut, sehingga terlihat kumuh dan semrawut serta menimbulkan penciuman tidak mengenakan. Pembuatan parit tidak tertata baik sehingga tidak berfungsi maksimal sebagaimana harusnya. Ironisnya, Pemkab Batubara tidak mampu mengembalikan fungsi Jalan Nelayan setelah berubah menjadi tempat berjualan. Sakitnya, janji OK Arya untuk membangun terminal di Tanjungtiram tak terwujud hingga terkena OTT. Kota Tanjungtiram di era tahun 1930-an adalah merupakan sumber dan lumbung ikan di

Sumut, sehingga kota tersebut menjadi pusat ekonomi di Batubara.

Penutup

Sesepuh masyarakat Batubara H. Djumiran Abdi ketika melakukan sosialisasi pemekaran Batubara dari Kabupaten Asahan, berulang kali menegaskan bahwa Kabupaten Batubara nantinya harus menjadi contoh daerah pemekaran yang bebas korupsi. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jangan menyogok, APBD jangan diobok-obok. Tapi, bupati pertama OK Arya mengkhianati keinginan sesepuh dan masyarakat. Awal-awal pemekaran, para pejuang pemekaran Batubara sering memberi nasihat agar bupati komitmen terhadap cita-cita perjuangan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak melakukan korupsi. Sedihnya, bagi mereka yang menunjukkan "jalan yang lurus" dianggap musuh dan jika musuh harus di jauhi. Sementara bagi mereka yang setuju terhadap kebijakan, meskipun "bengkok" dianggap kawan, teman dan sahabat. Itulah yang disebut "panglima talam".

Tujuan dasar pemekaran Batubara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harkat dan martabat serta harga diri. Sebab, selama bergabung dalam Kabupaten Asahan, pembangunan berbagai sektor di Batubara seperti diabaikan. Berdasarkan semangat itulah, masyarakat Batubara baik di Batubara dan di perantauan menyakan semangat, keinginan dan bersikap menuntut agar Batubara kembali seperti dulu yakni lepas dari pemerintahan Kabupaten Asahan. Pemekaran Batubara sedikit berbeda dengan daerah lain. Batubara menjadi kabupaten sendiri didapat dengan perjuangan yang tidak lenal bahkan tetesan air mata di daerah. Oleh karena itu, peringatan bagi semua calon bupati, jika ingin "mencuri jangan Batubara" pasti kena bala. Doa orang Batubara masih banyak yang dijawab oleh Allah *subhanahuwata'alah*.

Penulis adalah Kalit Waspada/dosen UI